

EFEKTIVITAS PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

Oleh :
Tondhi Ramadhan
Email : dreamoffyth@gmail.com
Pembimbing : Drs. Syamsul Bahri, M.Si

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Kampus Bina Widya Simpang Baru
Pekanbaru Indonesia

ABSTRAK

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Sosiologi. Dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru”. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Efektivitas program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tampan. Subjek dalam penelitian ini adalah 72 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Probability sampling* yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode yang digunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif karena metode ini lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Instrumen penyaringan data yang digunakan adalah observasi, daftar pertanyaan, dan dokumen. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas, teori pemberdayaan masyarakat dan teori kemiskinan. Hasil penelitian secara umum yang dilakukan maka penulis dapat mengatakan bahwa dengan uji t sebesar $t_{hitung} = 14,000 > t_{tabel} = 0.2319$, dan signifikansi = $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o di tolak, yaitu variabel efektivitas Program BPNT mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Program BPNT, Masyarakat, Kecamatan Tampan

**EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM OF BPNT ON THE IMPROVEMENT
OF COMMUNITY WELFARE IN
TAMPAN DISTRICT PEKANBARU**

By

Tondhi Ramadhan

Email: dreamoffyth@gmail.com

Mentor: Drs. Syamsul Bahri, M.Si

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences
Jl. HR. Soebrantas KM. 12.5 Bina Widya Simpang Baru Campus
Pekanbaru Indonesia

ABSTRACT

This thesis is proposed to qualify for a Bachelor of Sociology degree. With the title "BPNT Program Effectiveness on Welfare Improvement at Tampan District Pekanbaru". The problem discussed in this thesis is how the effectiveness of BPNT program to improve the welfare of the community in Tampan District. Subjects in this study were 72 people. Sampling technique in this research is Probability sampling technique that is sampling technique that gives equal opportunity for every element of population to be selected become member of sample. The method used descriptive quantitative research methods because this method is more emphasis on aspects of measurement objectively against social phenomena. Data filtering instruments used are observations, questionnaires, and documents. The theory used is the theory of effectiveness, theory of community empowerment and the theory of poverty. Generally, the result of the research is done by the writer can say that with t test of $t_{count} = 14,000 > t_{tabel} = 0.2319$, and significance = $0,000 < 0,05$ then H_a accepted and H_o rejected, the effectiveness variable of Program BPNT has partially significant influence to Improvement of People's Welfare.

Keywords: BPNT Program, Community, Tampan, Pekanbaru

Pendahuluan
Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara

manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupandi banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global.

dilihat dari PDRB Perkapita. PDRB Perkapita menjadi salah satu faktor kemiskinan daerah karena ketika pertumbuhan ekonomi cepat maka pendapatan rumah tangga juga mengalami perbaikan. Hal tersebut dapat memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank-bank Negara).¹

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra).

Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg.

Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik.

1 Nasir, M. Muh, dkk. (2008). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo". Jakarta: Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi

Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Salah satu kota yang telah menerapkan program BPNT adalah Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Tentang Program BPNT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai (Ratas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016).

Secara spesifik Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini Adapun pedoman Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM;

4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;

5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,-/ K P M / bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong.

Pagu Penerima Bantuan Pangan Kota merupakan jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai di setiap kota. Pagu Bantuan Pangan Non Tunai untuk setiap kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.

2.2 Efektivitas

Mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Ukuran efektifitas menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Efektivitas tersebut, dapat

dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya.

Menurut (Sutrisno, 2007: 125-126) menjelaskan bahwa ukuran efektivitas program di dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

a) Pemahaman Program

Pemahaman program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan atau stakeholder mengetahui dan memahami kegiatan program serta ²mengenai sosialisasi tentang e-Warong tersebut.

b) Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu, dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

c) Tepat Waktu

Merupakan, jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam tata kelola e-Warong adalah proses pencairan dana bantuan sosial melalui e-Warong, harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

d) Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan yaitu, diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program, maupun dengan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program.

e) Perubahan Nyata

Dapat diukur, melalui sejauh mana pelaksanaan kegiatan e-Warong memberikan suatu efek atau dampak

serta perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Kemudian, Menurut Richard M. Steers (dalam Tangkilisan, 2005) menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator dalam pengukuran efektivitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 indikator yaitu, kurun waktu, sasaran dan dasar hukum yang merupakan target kongkret.

b) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi dan sebagai pengembangan konsensus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekankan kepada proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lapangan dan sarana-prasarana yang memadai. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengukur suatu efektivitas yaitu, menurut Gibson et al (dalam Arif, 2017: 12-13), menjelaskan bahwa ukuran efektivitas organisasi terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Produksi

Produksi dalam kriteria efektivitas merupakan sebuah ukuran keluaran yang dihasilkan dari suatu organisasi. Ukuran produksi mencakup

² Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

keuntungan, penjualan, dokumen yang diproses, Konsumen yang dilayani, dan sebagainya.

2. Efisiensi

Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya.

3. Kepuasan

Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.

4. Keadaptasian

Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya, serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan dan sebagainya³ merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

5. Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggungjawab organisasi perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Untuk kriteria atau ukuran dalam efektivitas juga dikemukakan oleh Siagian (dalam Sanjaya, 2015:11-13), efektivitas terdiri dari 8 kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam pelaksanaan kegiatan/kebijakan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan dari organisasi bisa tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi diperlukan sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, agar pihak pelaksana kegiatan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Analisis dan perumusan kebijakan berfungsi untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditentukan, dalam artian kebijakan yang dibuat harus dapat menjabatani tujuan yang ada melalui pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang.

Dalam pembuatan kebijakan, harus dilakukan perencanaan yang tepat dan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang, dapat terstruktur dengan baik.

5. Penyusunan program yang tepat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, diperlukan penyusunan yang tepat, karena akan menjadi arah/alur dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja,

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat mendukung serta mengoptimalkan kinerja.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Suatu program harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena sebagai tolak ukur dari proses serta output yang dihasilkan. Apabila, dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka

3 Sanjaya, Wina. 2015. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Grup

efektif dan efisien dikatakan tidak berhasil/gagal.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Pengawasan dan pengendalian diperlukan dalam suatu pelaksanaan kegiatan, karena dapat mengontrol dan mengendalikan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Dwiyanto (dalam Putra, 2017: 9-10), menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance, secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga pilar yaitu:

1) Negara/Pemerintahan.

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Selain itu, pemerintah juga berfungsi dalam hal regulasi/pembuatan kebijakan publik, pengendalian dan pengawasan publik, fasilitas kepentingan negara dan publik serta pelayanan kepentingan publik.

2) Sektor Swasta

Sektor swasta dalam hal ini, merupakan perusahaan yang aktif dalam penyelenggaraan sistem pasar seperti perdagangan dan industri. Selanjutnya, sektor swasta berfungsi sebagai penggerak aktivitas di bidang ekonomi, penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan serta penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. Masyarakat

Dari penjelasan diatas, hubungan kerjasama antar stakeholder, khususnya dari pihak swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, karena berfungsi sebagai penggerak perekonomian dan pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sektor swasta dan masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam

menjalankan proses pembangunan. Kemudian, untuk dapat mengukur sejauh mana pengelolaan e-Warong, maka penelitian ini akan merujuk kepada 1 (satu) prinsip Good Governance yaitu Efektivitas. Prinsip ini sangat diperlukan, karena mampu memberikan analisis lebih mendalam terkait pengelolaan e-Warong tersebut.

2.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), secara konseptual berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Paul dalam A.M.W. Pranaka (1996), pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan". Pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek yaitu, to give or authority dan to give ability to enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan, (Safri Miradj dan Sumarno, 2014: 106).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian kehidupan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di E-Warung Rajawali Tobek Gadang Kecamatan Tampan Pekanbaru. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan, karena Kecamatan Tampan merupakan salah satu daerah yang penduduk miskin terbanyak yang ada di Pekanbaru..

3.2 Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari responden yang berguna menjawab permasalahan yang ada. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang terdiri identitas subjek, data kemiskinan di kota Pekanbaru, data penerima BPNT dan data yang berkaitan dengan permasalahan tentang implementasi program BPNT di kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang ada guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku referensi, buku-buku dari perpustakaan, internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan pembahasan mengenai implementasi program BPNT di kota Pekanbaru.

3.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Observation)

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan

subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.

2. Kuesioner (Angket Penelitian)

Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini karena dokumen merupakan sumber yang stabil, sesuai dengan penelitian kualitatif dan sebagai bukti untuk pengujian dan pengkajian isi untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan yang diselidiki.

3.4 Analisis data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terdiri dari berbagai sumber yang diperoleh melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi. Langkah selanjutnya mengkatagorikan data tersebut dengan tujuan untuk mempermudah dalam menjelaskan dan mendapat gambaran yang jelas. Setelah itu dibuat abstraksi untuk mengetahui garis besar permasalahannya, sehingga mempermudah untuk menarik kesimpulan dan dapat mengungkapkan Implementasi Program BPNT Untuk Masyarakat Miskin Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Kesimpulan yang didapat dari hasil interpretasi penulis tentunya dikaitkan dengan teori-teori yang disesuaikan dan

berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan dirasakan penulis selama penelitian dilakukan. Dengan demikian, deskripsi yang disajikan dalam penelitian ini lebih menyeluruh dan mendalam.

3.5 Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan pernyataan sejauh mana data yang dirampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuesioner dalam mengidentifikasi suatu variabel. Menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari corrected item – total correlation masing-masing pertanyaan

3.6 Uji Analisis Data

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas (independent) dan satu variabel terikat (dependent). Analisis ini untuk mengetahui arah dan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen apakah positif atau negatif serta untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

3.7 Penentuan Variabel

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Variabel dependent (Terikat)
Variabel Terikat (Y) adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Variabel Independent (Bebas)
Variabel bebas (X) adalah Efektivitas Program BPNT.

3.8 Pengujian Hipotesis Data

- a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen (menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman X), atau dengan kata lain seberapa besar X dapat memberikan kontribusi terhadap Y. Koefisien determinasi (R^2) mempunyai range antara 0 – 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1) maka pengaruh variabel bebas dianggap kuat, dan begitu pula sebaliknya. Rumus perhitungannya adalah hasil kuadrat dari hasil perhitungan korelasi ganda 3 prediktor

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data SPSS dengan melakukan uji statistik yakni :

1. Uji Regresi sederhana yang digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (Dependent).
2. Uji t (Uji Parsial) digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel.
3. Uji Determinasi R^2 dilakukan untuk membuktikan proporsi atau persentase pengaruh yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel.

Teknik Pengukuran

Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert (5:4:3:2:1). Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987

tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah lebih kurang 199.792 km². Kemudian Kecamatan Tampan ini terbentuk dari gabungan beberapa desa dan Kecamatan yang pada awalnya merupakan desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

- a) .Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b) Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- c) Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d) Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

dari 4 (empat) desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003,15 wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Tampan dan Payung Sekaki, sehingga Kecamatan Tampan memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sampai saat ini luas wilayah kecamatan Tampan adalah ± 65 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 173.281 jiwa, yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: kelurahan Simpang Baru, kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sidomulyo Barat dan kelurahan Delima. 16 Kecamatan Tampan adalah salah satu kelurahan yang terletak dikecamatan Tampan kota Pekanbaru provinsi Riau.

4.2 Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi.

Perubahan dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan perekonomian.

4.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Karena adanya pendidikan dapat menentukan status sosial seseorang, apabila pendidikan seseorang baik maka taraf kehidupannya akan baik juga. Perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju dan berkembang perlu adanya pendidikan agar tidak terjadinya ketimpangan budaya mengenai modernisasi.

4.4 Profil BPNT

Adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, 4.5 Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/SDGs).

4.5 Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan SNKI.
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

4.6 Prinsip Umum BPNT

Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi.

Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM.

Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden Penelitian

Secara umum dapat dilihat dari pembahasan karakteristik Responden Penelitian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

5.2 Umur

Informasi tentang umur merupakan salah satu informasi mendasar yang dibutuhkan oleh peneliti. Umur tidak hanya menentukan dalam kelompok mana seseorang di golongan yang

terpenting adalah bahwa umur juga menjadi barometer yang membedakan cara pandang masyarakat terhadap seseorang.

5.3 Analisis Efektivitas Program BPNT terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran/deskripsi mengenai tanggapan dari responden mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian.

5.3 Uji Instrumen Data

Uji validitas merupakan pernyataan sejauh mana data yang dirampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuesioner dalam mengidentifikasi suatu variabel. Kriteria uji validitas adalah dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat penerima BPNT di Kecamatan Tampan Pekanbaru mengenai Efektivitas program BPNT terhadap Peningkatan kesejahteraan masyarakat selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penelitian pada variabel Efektivitas program BPNT didapat hasil yang menunjukkan Efektivitas program BPNT di Kecamatan Tampan secara keseluruhan dalam kategori baik.
2. Setelah dilakukan penelitian pada variabel Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat didapat hasil yang menunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di

Kecamatan Tampan secara keseluruhan dalam kategori cukup baik.

3. Setelah dilakukan penelitian secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Efektivitas Program BPNT mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis memberi saran:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat miskin di kota Pekanbaru agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Pekanbaru.

2. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait pelaksana program BPNT seperti dinas sosial lebih teliti dalam penyaluran program BPNT yaitu tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah kepada masyarakat penerima program BPNT.

3. Diharapkan kepada masyarakat penerima bantuan program BPNT agar lebih memanfaatkan bantuan yang di berikan Pemerintah dengan baik misalnya dengan membuat bisnis kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4. Diharapkan kepada para pembaca agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Aziz, Ali, Moh, Suhartini, Rr, Halim, A, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi*

Metodologi, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara

A.M.W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, “ Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan :Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta

Badrul, Munir 200 2. *Perencanaan Pembangunan Daerah: dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta : BAPPEDA Propinsi NTB

Cecilia, Merlin. (2014). *Exploring the Impact of Brand Equity, Corporate Reputation, and Product Quality on Customer Loyalty toward a National Newspaper in Surabaya*. *iBus Management Vol. 2, No. 2, (2014) 40-49*

Cholisin. 2011. *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran PKn*. Makalah di sampaikan pada kegiatan MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta

Eko, Sutoro. 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*

Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasir, M. Muh, dkk. (2008). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo”. *Jakarta: Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi*

Sadono.(2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar.Edisi-3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Safri Miradj dan Sumarno. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Saleh,Samsubar.2002. Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang

Sanjaya,Wina. 2015. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Grup

Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama

Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP.AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Todaro, M. 2006. Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

SKRIPSI DAN JURNAL

Lisa Kurniawati. 2017, Analisis Dampak Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai Sebagai Pengganti Rastra Dan Evaluasi Sistem Pelaksanaannya Di Kota Surakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Sebelas MaretSurakarta

Amanda Vitha Kurnia. Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang): Universitas Brawijaya

Muhamad Rafiudin. 2016, Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Ilmu Administrasi Negara: universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Mayang Shahira Junaidi. 2018. Komparasi Kepuasan Penerima Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Dan Penerima Rastra Di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Program Agribisnis: Universitas Diponegoro

Ika Ernawati. 2013, Iimplementasi Program Keluarga HarapanDi Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, Administrasi negara, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: Universitas sebelasMaret Surakarta

INTERNET

cpps.ugm.ac.id, (Di akses pada tanggal 2 februari 2018)

www.m.antaranews.com, (di akses pada tanggal, 6 februari 2018)

Hatu, Rauf A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis). Diakses pada 10 februari 2018, dari

<http://kesejahteraansosial.blogspot.com/2013/02/pengertiankesejahteraan-sosial.html>http://www.academia.edu/3398666/PEMBERDAYAAN_

DAN_PENDAMPINGAN_SOSIAL_D
ALAM_MASYARAKAT_Suatu_Kajia
n_Teortis_ <http://kbbi.web.id>